



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Jl. Bina Praja Timur (Komp. Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan)

☎0511-3252319 ☎0511-3253742 E-mail: pta.banjarmasin@gmail.com

Banjarbaru 70732

Nomor : W15-A/657/HM.00/3/2022 Banjarbaru, 18 Maret 2022
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Usul Penilaian Pembangunan Zona
Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun
2022

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Se-Kalimantan Selatan

Di -

Tempat

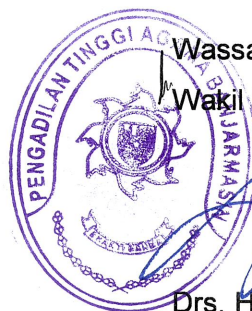
Assalamualaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Pengawasan Nomor 158/BP/HM.01.1/3/2022 tanggal 11 Maret 2022 dan surat Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Nomor 1386/DjA.3/HM.00/2/2022 tanggal 17 Maret 2022 perihal sebagaimana pokok surat, maka dengan ini kami minta kepada saudara untuk :

1. Mengirimkan LKE PMPZI dengan format terbaru kepada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin melalui email **pta.banjarmasin@gmail.com**
2. Mengisi data laporan PMPZI pada aplikasi kinsatker, tutorial dapat dilihat pada link **<https://youtu.be/BArjFDahNu8>**
3. Mengupload dokumen pra kualifikasi pada aplikasi PMPZI Mahkamah Agung.
4. Mengupload dokumen pembangunan Zona Integritas pada aplikasi PMPZI Mahkamah Agung.

Dokumen sebagaimana disebutkan pada angka 1, 2 dan 3 dipenuhi paling lambat tanggal 21 Maret 2022 pukul 10.00 WITA. Sedangkan dokumen pada angka 4 dipenuhi paling lambat tanggal 31 Maret 2022.

Demikian, atas perkenannya diucapkan terima kasih.



Wassalam

Wakil Ketua,

Drs. H. Achmad Hanifah, M.HES.

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 Cempaka Putih Lantai 6-8 Jakarta Pusat 10570

Telp. 021-29079177 Fax. 021-29079277, 29079211

Home Page : www.badilag.mahkamahagung.go.id

e-mail : ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1386 /DjA.3/HM.00/3/2022
Lampiran : 1 exp
Perihal : Usul Penilaian Pembangunan Zona Integritas
Menuju WBK/WBBM Tahun 2022

17 Maret 2022

Yth :

1. Ketua Mahkamah Syarriyah Aceh
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
3. Ketua Mahkamah Syarriyah
4. Ketua Pengadilan Agama

di -

Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

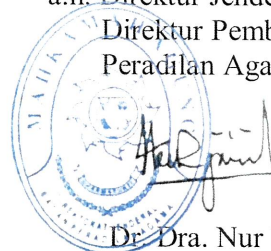
Bahwa dalam rangka usul dan verifikasi penilaian pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2022, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penilaian Pembangunan Zona Integritas Satuan Kerja mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Instansi Pemerintah (LKE Terlampir);
2. Setiap Pengadilang Tinggi Agama/Mahkamah Syarriyah Aceh segera mengirimkan daftar usul satker diwilayahnya untuk penilaian WBK/WBBM Tahun 2022 paling lambat Selasa tanggal 21 Maret 2022 dengan ketentuan:
 - a. Nilai PMPZI Satker Memenuhi standar minimal yang ditetapkan;
 - b. Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu berpredikat A;
 - c. Untuk WBK, nilai LKJIP minimal B;
 - d. Untuk WBBM nilai LKJIP minimal BB dan telah 1 tahun meraih WBK;
 - e. Pimpinan dan seluruh aparatur pengadilan memahami pembangunan ZI.
3. Untuk percepatan rekapitulasi usul dan verifikasi data diminta setiap satuan kerja mengisi data laporan PMPZI pada aplikasi kinsatker paling lambat Selasa tanggal 21 Maret 2022 dengan cara :
 - a. Mengisi data PMPZI dengan langkah sebagai berikut:
 - 1) Mengisi LKE sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas;
 - 2) Memindahkan "**NILAI**" pada form LKE sebagaimana dimaksud pada huruf a kedalam aplikasi kinsatker (tutorial : <https://youtu.be/BArjFDahNu8>).
 - b. Mengisi data informasi tambahan (LKJIP dan TLHP) sesuai dengan dokumen sumber yang ada pada satuan kerja.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pembinaan Administrasi
Peradilan Agama,



Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H.

Tembusan Yth :
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGAWASAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
By Pass Cempaka Putih Timur - Jakarta Pusat 10510
Telp. 021-29079177, Fax. 021-29079274

Nomor : **158**/BP/HM.01.1/3/2022

Jakarta, 11 Maret 2022

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Pengisian LKE dan *upload* data dukung Pembangunan Zona Integritas

Yth.

1. Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
5. Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI;
6. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan;
7. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan.

di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/63/PW.04/2021 tanggal 31 Desember 2021 Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2021, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil evaluasi, Tim Penilai Nasional memberikan beberapa catatan dan rekomendasi yakni sebagai berikut:
 - a. Pimpinan dan seluruh anggota unit kerja harus mampu menjelaskan dan memastikan dengan baik perubahan yang terwujud (*before - after*) untuk dapat menggambarkan kondisi apa yang ingin diwujudkan pada sasaran setiap area perubahan. Lebih lanjut, agar rencana aksi pembangunan ZI perlu dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan;
 - b. Unit kerja perlu mereviu peta risiko agar seluruh potensi-potensi pelanggaran integritas dalam pelayanan dan pelaksanaan pekerjaan/tugas sehari-hari dapat diidentifikasi dan dimitigasi secara efektif; serta secara rutin mengevaluasi penerapan manajemen risiko agar dapat menilai efektivitas mitigasi risiko dan mengantisipasi potensi terjadinya modus-modus baru dalam pelanggaran integritas;
 - c. Unit kerja perlu memastikan seluruh komplain/aduan pengguna layanan/*stakeholder* di setiap saluran pengaduan ditangani dengan baik, yaitu dengan merespon dan memberi informasi progres penanganannya secara "*realtime*";
 - d. Unit kerja perlu mengembangkan inovasi yang mendorong capaian kinerja utama, penguatan integritas, sesuai kebutuhan pengguna layanan, dan mengatasi isu strategis;
 - e. Unit kerja perlu membangun komunikasi yang intensif dengan pengguna layanan dan *stakeholder* sehingga dapat mengurangi gap antara harapan pengguna layanan/*stakeholder* dengan kinerja layanan yang diberikan.
2. Berdasarkan hasil evaluasi dan catatan di atas, Tim Penilai Internal (TPI) akan segera melakukan evaluasi atas Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Tahun 2022 di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya melalui kegiatan *desk evaluation* PMPZI;

3. Guna mengefektifkan kegiatan *desk evaluation* PMPZI tersebut, diharapkan kepada seluruh unit kerja, baik yang telah memperoleh predikat WBK dan WBBM maupun yang akan diusulkan memperoleh predikat menuju WBK dan WBBM Tahun 2022 untuk segera menyiapkan Laporan Hasil PMPZI berupa:
 - a. Laporan Hasil PMPZI;
 - b. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai dengan Format Lampiran III Permen PANRB Nomor 90 Tahun 2021;
 - c. Data Dukung yang relevan dan terkini (*update*);
 - d. Melampirkan surat keterangan tidak memiliki catatan hukuman disiplin berat yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan pada tahun pengusulan (tahun berjalan). Permohonan surat keterangan tersebut dapat dikirimkan melalui email: informasi@badanpengawasan.net.
4. Seluruh dokumen tersebut segera disampaikan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung melalui <https://pmpzi.mahkamahagung.go.id> paling lambat 31 Maret 2022.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI



H. DWIARSO BUDI SANTIARTO

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Para Inspektur Wilayah Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.